

Bupati Balangan Sampaikan Rancangan KUA PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



Sumber gambar:

<https://wartaniaga.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240714-WA0002-e1720918021831-768x346.jpg>

Bupati Balangan, H Abdul Hadi sampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2024, Sabtu (13/7/2024) di ruang rapat paripurna DPRD Balangan.

Hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna ke 19 masa sidang ke II tahun 2024 DPRD Balangan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan.

Bupati Balangan, H Abdul Hadi menyampaikan, kebijakan serta penyusunan APBD di tingkat Kabupaten harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi.

Hal tersebut tentunya harus ada sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

“Sinkronisasi ini bukan hanya sekedar keharusan bagi kita sebagai daerah yang menjadi bagian dari entitas lain yang lebih besar, yaitu provinsi dan negara, namun di sisi lain adalah demi kepentingan kita juga,” jelasnya.

Bupati Balangan menambahkan bahwa sinkronisasi tersebut harus diwujudkan, salah satunya melalui dan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan perubahan PPAS.

“Penyusunan rancangan KUA – PPAS dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Balangan, serta target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Balangan,” jelasnya.

Ia menyampaikan untuk perubahan anggaran tahun 2024, Kabupaten Balangan mendapat kenaikan pada kisaran 17,31 persen dan mampu menambah belanja sebesar 17,77 persen.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2025, karena masih belum dapat memastikan beberapa hal, Bupati Balangan memproyeksikan tidak terlalu tinggi, yaitu pendapatan sebesar Rp 3,189 triliun atau turun 7,73 persen dibanding anggaran murni tahun 2024.

Kemudian, untuk belanja sebesar 3,235 triliun atau turun 3,4 persen dibanding anggaran murnitahun 2024.

“Meskipun turun sedikit, tetapi nominalnya masih sangat besar dan tetap menantang kita semua untuk melaksanakan pembangunan daerah kita tahun depan,” kata Abdul Hadi.

Pembangunan tersebut tentunya dengan tema RKPD Kabupaten Balangan yaitu “Pemenuhan Infrastruktur dan Peningkatan Perekonomian Dalam Menunjang Daya Saing Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah dan Kabupaten Balangan melakukan kesepakatan bersama terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, serta rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Balangan TA 2024.

Kesepakatan tersebut berlangsung pada rapat paripurna ke-20 masa sidang ke II tahun 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Jumat (19/7/2024).

Dalam sambutannya, Bupati Balangan, H Abdul Hadi memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Balangan yang telah membahas kesepakatan tersebut secara rinci dengan waktu yang singkat.

“Mudahan merupakan hasil yang terbaik dan menjadi salah satu persembahan yang terbaik pula bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Hadi mengatakan bahwa rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun 2024 yang disetujui bersama akan menjadi salah satu pedoman utama dalam menyusun perubahan APBD untuk tahun anggaran 2024.

“Prioritas pembangunan sudah kita pertajam dan kita sepakati, maka selanjutnya menjadi kewajiban kami untuk menyusun perubahan anggaran yang akan menyokong pelaksanaan prioritas-prioritas tersebut,” katanya.

Bupati berharap, rancangan perubahan anggaran tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan sesegeranya disampaikan ke DPRD Balangan.

“Untuk itu kepada segenap jajaran Eksekutif, kami intruksikan untuk segera menyelesaikan penyusunan perubahan anggaran tahun 2024 dengan pedoman kepada dokumen perubahan KUA dan PPAS yang telah disetujui dewan,” ucapnya.

Sama halnya dengan KUA dan PPAS APBD tahun 2025 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025.

“Saya meminta semua tahapannya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang dapat dimulai secepat mungkin,” tambah Bupati.

Bupati Balangan juga meminta dukungan dan masukan kepada DPRD Balangan dan seluruh unsur masyarakat agar anggaran yang disusun nantinya semakin tepat sasaran dan efisien.

Sumber Berita

1. <https://wartaniaga.com/2024/07/bupati-balangan-sampaikan-rancangan-kua-ppas-apbd-ta-2025/>, Bupati Balangan Sampaikan Rancangan KUA PPAS APBD TA 2025, (14/07/2024).
2. <https://www.baritopost.co.id/pemkab-balangan-dan-dprd-balangan-sepakati-rancangan-kua-ppas-apbd-tahun-2025-dan-rancangan-perubahan-apbd-tahun-2024/>, Pemkab Balangan dan DPRD Balangan Sepakati Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, (06/08/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 3) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 4) Rancangan KUA memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penJrusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategipencapaian
- 5) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing masing Program dan Kegiatan